

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tenggarong, 23 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara


Setianto Nugroho Aji, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	3
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Perencanaan Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja	27
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	52
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Perbaikan Kedepan	58
LAMPIRAN	
Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	
Pembangunan Daerah	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	10
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional	11
Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Honorer / THL Menurut Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.6 Jumlah Petugas Operasional Telah Mengikuti Pendidikan dan	
Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana	11
Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12
Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam ..	12
Tabel 1.9 Sarana dan Prasarana Berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan	12
Tabel 2.1 Potensi, Peluang dan Kendala yang Ada	16
Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	19

Tabel 2.4 Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 2.6 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2023	24
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya	42
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	46
Tabel 3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis	51
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2023	52
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Sebelumnya (2022)	54
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah,.....	72
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	84
Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Per Kecamatan	93
Dokumentasi Pra Bencana	96
Dokumentasi Kegiatan Tanggap Darurat	97
Dokumentasi Kegiatan Pasca Bencana	98
Dokumentasi lainnya.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan

kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyebutkan bahwa BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan :

1. BPBD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.

2. BPBD sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Demikian juga pada Pasal 3, yang menyebutkan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

1. BPBD mempunyai tugas sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
2. BPBD mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
 - a. Pelaksanaan program kerja dan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
 - b. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana;
 - c. Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya subbidang penanggulangan bencana; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana. Hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampaknya nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala dalam operasional organisasi dan penanganan kebakaran dan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal.

Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung

kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:
 - a) Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif kependekatan preventif.
 - b) Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan pada hal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana
 - c) Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.
- b. Dalam aspek Kelembagaan
 - a) Belum ada dan optimalnya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, Tim JITU PASNA, dll
 - b) Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari SATLAK PB kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, kembali lagi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
- c. Dalam aspek Ketugasan:
 - a) Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
 - b) Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
 - c) Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
 - d) Masih minimnya relawan siaga bencana.
 - e) Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.

- f) Belum ada dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
- g) Laporan data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar ,sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Tabel. 1.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK(Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
1. Pelayanan Informasi ,Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana belum optimal	1. Pelayanan Informasi Rawan bencana belum optimal.	1. Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang
		2. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi.
		3. Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
	2. Pelaksanaan Pencegahan dan kesiapsiagaan masih rendah	1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
		2. Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS).
		3. Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
		4. Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
2. Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	3. Pelaksanaan Penanganan Bencana , Penyelamatan dan Evakuasi Korban belum optimal	5. Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
		1. Keterbatasan jumlah Aparat Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
		2. Keterbatasan Sertifikasi keahlian petugas penyelamatan dan evakuasi korban bencana
		3. Keterbatasan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	1. Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum maksimal	4. Belum terbentuknya Tim Reaksi Bencana (TRC) Kabupaten.
		1. Ketebatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

PERMASALAHAN POKOK(Eselon II)	PERMASALAHAN (Eselon III)	AKAR MASALAH (Eselon IV)
		2. Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah
		3. Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat.
	2. Belum adanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah	1. Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah.
		2. Belum terjalinnya kemitraan antar stakeholder dalam penanggulangan pasca bencana
		3. Belum tersedianya Data Induk Kebencanaan

1.5 Uraian Singkat Organisasi

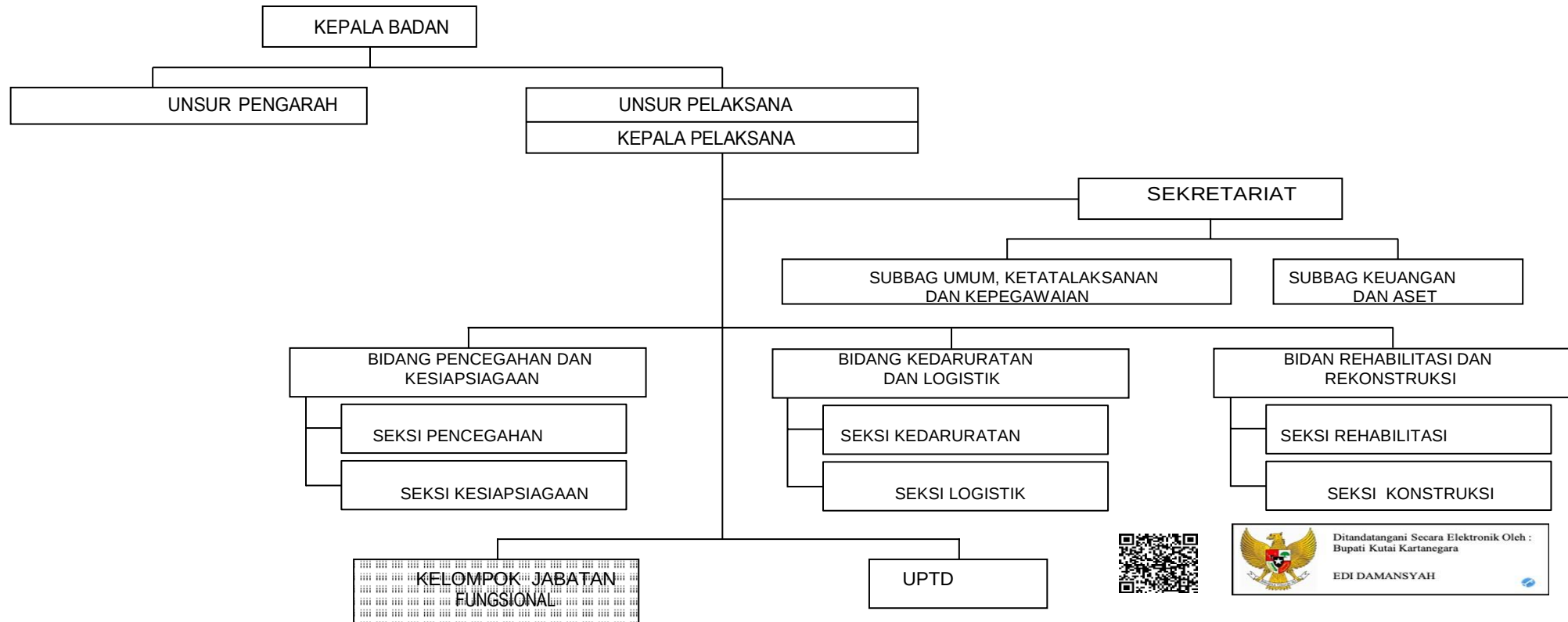
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan kebakaran dan bencana di daerah serta berada pada posisi yang sangat strategis karena dapat menentukan tingkat kualitas dalam penanganan kebakaran dan bencana di daerah yaitu dengan melakukan antisipasi pengurangan resiko sebelum bencana terjadi. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengevaluasi penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Susunan Organisasi BPBD sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a) Kepala Pelaksana;
 - b) Sekretariat yang membawahkan dan mengoordinasikan :
 1. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :
 1. Seksi Pencegahan;

- 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik :
 - 1. Seksi Kedaruratan;
 - 2. Seksi Logistik.
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :
 - 1. Seksi Rehabilitasi;
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
- g) UPTD.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Bupati Kutai Kartanegara

EDI DAMANSYAH

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada unsur pelaksana terdiri dari Pejabat Struktural (Eselon IIB, IIIA, IIIB dan IVA) dan Pejabat Non Struktural (Fungsional Umum dan Teknis), seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

No.	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Utama	IV/E	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/D	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV/C	1	-	1
4.	Pembina Tingkat I	IV/B	1		
5.	Pembina	IV/A	5	1	6
6.	Penata Tingkat I	III/D	6	2	8
7.	Penata	III/C	1	-	1
8.	Penata Muda Tingkat I	III/B	2	1	3
9.	Penata Muda	III/A	6	1	7
10.	Pengatur Tingkat I	II/D	16	5	21
11.	Pengatur	II/C	1	-	1
12.	Pengatur Muda Tingkat I	II/B			
13.	Pengatur Muda	II/A			
14.	Juru Tingkat I	I/D			
15.	Juru	I/C			
16.	Juru Muda Tingkat I	I/B			
17.	Juru Muda	I/A			
Jumlah			39	10	49

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kab. Kukar 2023

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebanyak 49 orang Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	3	2	5
3.	Sarjana (S1)	16	3	19
4.	Sarjana Muda	2	-	2
5.	SLTA/SMU	16	8	24
6.	SLTP			
7.	Sekolah Dasar			
Jumlah		37	12	49

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kab. Kukar 2023

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Tingkat Esselon	Struktural		Fungsional		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Esselon II/B	1	-	-	-	1
2.	Esselon III/A	1	-	-	-	1
3.	Esselon III/B	3	-	-	-	3
4.	Esselon IV/A	11	1	1	1	14
Jumlah		16	1	1	1	19

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Tahun 2023

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Honor/THL menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
3.	Sarjana (S1)	37	-	37
4.	Sarjana Muda	3	-	3
5.	SLTA/SMU	142	11	153
6.	SLTP	7	2	9
7.	Sekolah Dasar	1	13	14
Jumlah		190	26	216

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Tahun 2023

Tabel 1.6 Jumlah Petugas Operasional telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Pemadam Kebakaran dan Bencana

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)	Ket.
1.	SAR MFR Dan Water Rescue	25	
2.	Jungle Rescue	25	
3.	HART Dan MFR	20	
4.	Scuba Diving And Sea Survival	20	
5.	Water Rescue Lanjutan	20	
6.	Personil DAMKAR Tingkat Dasar	33	
7.	Personil DAMKAR Tingkat Lanjutan	12	
8.	Basic Water Rescue	25	
Jumlah		180	

Sumber Data : Kepegawaian BPBD Kab. Kukar 2023

b. Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana penunjang yang dimiliki sesuai Tabel berikut :

Tabel 1.7. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Badan	2 Buah	Baik
2.	Pos Penanggulangan Bencana di Kecamatan	6 Buah	Baik
	Jumlah	8 Buah	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.8. Sarana dan Prasarana Kendaraan Roda Empat dan Roda Enam

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Ket.
1.	Mercedes Benz/1525 AF /4X4 (Ziegler Damkar)	3 Buah	Baik
2.	Hino WU342R- HKMRJD3 (Damkar)	3 Buah	Baik
3.	Toyota Dyna Long XZU342R-TKMQSD3 4.00 (Damkar)	2 Buah	Baik
4.	Toyota Dyna Long 4.600 X2U342R-TKMQSD (Damkar)	2 Buah	Baik
5.	Isuzu NKR 66 (Damkar)	2 Buah	Baik
6.	Ford Ranger 4X4 2900 cc Diesel MT	2 Buah	Baik
7.	Toyota KF 60 Kijang STD Pick UP (Damkar)	1 Buah	Baik
8.	Isuzu NKR 66 4334 (Damkar)	1 Buah	Baik
9.	Mercedes Benz 700 (Damkar)	1 Buah	Baik
10.	Toyota / Innova E Standar	1 Buah	Baik
11.	NISSAN	1 Buah	Baik
12.	Ford Rangger	1 Buah	Baik
13.	Ford	1 Buah	Baik
14.	Toyota	1 Buah	Baik
15.	Isuzu	1 Buah	Baik

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.9. Sarana dan Prasarana berupa Aset/Tanah/Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	Baik	
2.	Tanah bangunan Pos Jaga/Menara jaga	2	Baik	
3.	Mobil Roda 4	19	Baik	
		3	Kurang Baik	
4.	Roda 2	12	Baik	
5.	Mesin Compresor	1	Baik	
6.	Dongkrak Mekanik	1	Baik	
7.	Perkakas Bengkel Kerja Lain-Lain	1	Baik	
8.	Lemari Penyimpanan	1	Baik	
9.	Mesin Ketik Standar	3	Baik	
10.	Mesin Hitung	1	Rusak Berat	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
11.	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Kurang Baik	
12.	Lemari Besi	6	Baik	
13.	Rak Besi/Metal	1	Baik	
14.	Filling Kayu	5	Baik	
15.	Brankas	1	Baik	
16.	Lemari Kayu	1	Baik	
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	
18.	White Board	1	Kurang Baik	
19.	Alat Kantor Lainnya	3	Baik	
20.	Lemari Kayu	1	Baik	
21.	Meja Kayu/Rotan	1	Kurang Baik	
22.	Tempat Tidur Besi	2	Baik	
23.	Meja Rapat	5	Baik	
24.	Kursi Rapat	101	Baik	
25.	Kasur	1	Baik	
26.	Kasur	14	Rusak Berat	
27.	Tenda	2	Baik	
28.	Sofa	2	Baik	
29.	Jam Elektronik	5	Baik	
30.	Lemari Es	4	Baik	
31.	AC	19	Baik	
32.	AC	1	Kurang Baik	
33.	Kompor Gas	1	Baik	
34.	Tabung Gas	1	Baik	
35.	Alat Dapur lainnya	1	Rusak Berat	
36.	Alat Dapur Lainnya	1	Baik	
37.	Kamera Film	3	Baik	
38.	Alat Hiasan	1	Baik	
39.	Dispenser	1	Baik	
40.	Handycam	1	Rusak Berat	
41.	Handycam	1	Baik	
42.	Alat Pemadam Portable	3	Baik	
43.	Pompa Kebakaran	2	Baik	
44.	Pipa Pemancar	16	Baik	
45.	Baju Anti Panas	4	Baik	
46.	Masker Gas	60	Baik	
47.	Alat Pembantu Kebakaran	156	Baik	
48.	PC / Komputer	6	Baik	
49.	Notebook	10	Baik	
50.	Peralatan Komputer Lainnya	1	Baik	
51.	Printer	8	Baik	
52.	Monitor	5	Baik	
53.	Peralatan Personal Komputer	2	Baik	
54.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket.
55.	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
56.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	1	Baik	
57.	Kursi Kerja Pejabat Esselon IV	5	Baik	
58.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Baik	
59.	Proyektor	1	Baik	
60.	UPS	1	Baik	
61.	Handy Talky	1	Baik	
62.	Faxmili	1	Baik	
63.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Baik	
64.	Alat Komunikasi Lainnya	1	Rusak Berat	
65.	Alat Komunikasi Radio SSB	1	Baik	
66.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	Baik	
67.	Alat Pemadam Kebakaran	1	Baik	
68.	Gedung Kantor Semi Permanen	1	Baik	
69.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Baik	
70.	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1	Baik	
71.	Bangunan Hidran Umum	1	Baik	
72.	BCD	6	Baik	
73.	Tabung Scuba	6	Baik	
74.	Baju Scuba	5	Baik	
75.	Regulator	6	Baik	
76.	Sepatu Scuba	5	Baik	
77.	Vines	6	Baik	
78.	Pisau	6	Baik	
79.	Masker	6	Baik	
80.	Senter	6	Baik	
81.	Snorkel	6	Baik	
82.	Slayer	6	Baik	
83.	Sarung Tangan	6	Baik	
84.	Belt	6	Baik	
85.	Weight 4 Kg	5	Baik	
86.	Weight 2 Kg	10	Baik	
87.	Selang Compressor	3	Baik	

Sumber Data : Subbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

1.9. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 berasal dari APBD Pemerintah Daerah, Pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp34.761.442.482,00** pada saat Anggaran Perubahan bertambah menjadi **Rp49.150.470.937,00** bertambah **Rp14.389.028.455,00** yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran

strategis maupun program pendukung dengan rincian 3 (tiga) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 51 (lima puluh satu) Sub kegiatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 – 2021. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama tiga tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk menetapkan prioritas program kegiatan pembangunan yang strategis lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD yang dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sebagai tolak ukur pertanggung jawaban Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Adapun potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. dalam pencapaian selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Potensi, Peluang dan Kendala yang ada

Potensi	Peluang	Kendala Yang Ada
Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang	1. Sinkronisasi dan koorBadani yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya. (pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan). 2. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pra bencana, saat bencana sampai pasca bencana. 3. Partisipasi aktif dari organisasi politik,	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana serta pemahaman terhadap kesiapsiagaan ; 2. Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan

Potensi	Peluang	Kendala Yang Ada
optimal.	masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparat penanggulangan bencana. 4. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana; 5. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan /atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2023-2026 dalam masa kepemimpinannya Adalah “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Misi ke- 5 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu: Meningkatnya ketahanan bencana daerah dengan Indeks Risiko Bencana .

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, yaitu ;

Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, yaitu :
Serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.
3. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, yaitu; Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.
4. Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Melaksanakan Sosialisasi Informasi rawan bencana, meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi, serta peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana

No.	Strategi	Arah Kebijakan
2	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS), penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya, menyusun Dokumen Kontinjensi (Renkon), membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
3	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Menambah jumlah Aparat dan petugas penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang bersertifikasi, penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta mengoptimalkan peran Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten.
4	Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA), Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), meningkatkan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah serta mendorong terealisasinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah 2. Penyusunan sistem dasar penanggulangan bencana, melaksanakan kemitraan antar stakeholder dalam penanggulangan pasca bencana dan penyediaan Data Induk Kebencanaan.

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselaran Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Program Penanggulangan Bencana

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

Tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	Evaluasi Tim Reviu Inspektorat
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100	Dokumen LKPD disampaikan tepat waktu
Meningkatkan kualitas pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	68	Hasil Survey IKM 2023
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase layanan informasi Rawan Bencana	Persen	12,11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah seluruh warga negara dikawasan rawan bencana dikali 100
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	13,55	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi Jumlah seluruh warga negara dikawasan rawan bencana dikali 100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi Jumlah seluruh warga negara korban bencana dikali 100
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah
Menyelesaikan Tindakan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3	Jumlah temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti
Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berada di pengguna barang milik daerah	Persen	100	
Melaksanakan Pengelolaan pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	Data SIRUP
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	Data Tanda Terima Hasil Penyampaian Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	Data Tanda Terima Hasil Penyampaian Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Melaksanakan Tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	Penilaian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kukar
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	Aplikasi Satu Data dan E Pantau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi	Jumlah	1	
terrealisasinya Output kegiatan tanpa menimbulkan potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	Dokumen LKPD SKPD 2023
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	Dokumen LKPD SKPD 2023
	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	Dokumen LKPD SKPD 2023
Melaksanakan Manajemen resiko terhadap program kegiatan di peringkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "berAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi,internalisasi,penetapan leader,tim budaya kerja	Kegiatan	4	
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100	Data Pengembangan Kompetensi ASN BPBD
Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	Aplikasi Beppadah
Tercapainya Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	Aplikasi Beppadah
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	Penilaian dari Dinas Kesehatan

Tabel 2.6
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

NO	SASARAN	IDIKATOR	SATUAN	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	77	77
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntaasi (OPD) yang menyampaikan Laporan kauangan tepat waktu	OPD	100	100	100
3	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	66	68	68
4	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase layanan informasi Rawan Bencana	Persen	8,11	12,11	12,11
5	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	10,6	13,55	13,55
6	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100
7	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2	2	2
8	Menyelesaikan Tindakan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tamuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3	3	3
9	Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berada di pengguna barang milik daerah	Persen	100	100	100

NO	SASARAN	IDIKATOR	SATUAN	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
10	Melaksanakan Pengelolaan pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Brang dan Jasa	Persen	100	100	100
11	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	100	100
12		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	100	100
13	Melaksanakan Tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)
14	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100
15	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi repangkat daerah	Jumlah inovasi	Jumlah	1	1	1
16	terrealisasinya Output kegiatan tanpa menimbulkan potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100
17	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	100	100
18		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	100	100
19	Melaksanakan Manajemen resiko terhadap program kegiatan di peringkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	2

NO	SASARAN	IDIKATOR	SATUAN	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
20	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Data terkini	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	1
21	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "berAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi,internal isasi,penetapan leader,tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	4
22	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100	100	100
23	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	100	100
24	Tercapainya Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
25	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar $80\% \leq 100\%$. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	IDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRETERIA PENILAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,00			Belum ada Reviu
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100	100	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan kualitas pelayan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	68,00	77,04	113%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase layanan informasi Rawan Bencana	Persen	12,11	12,11	100%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	13,55	13,55	100%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
7	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2	2	100%	Sangat Tinggi
8	Menyelesaikan Tindakan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Tamuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3	0	0%	Sangat rendah
9	Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berada di pengguna barang milik daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
10	Melaksanaan Pengelolaan pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif	Persentase Pengelolaan Pengadaan Brang dan Jasa	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN	IDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRETERIA PENILAIAN
	dan akuntabel						
11	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
12		Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
13	Melaksanakan Tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	70	100%	Sangat Tinggi
14	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
15	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat daerah	Jumlah inovasi	Jumlah	1,00	0	0%	Sangat rendah
16	terrealisasinya Output kegiatan tanpa menimbulkan potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
17	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	92,71	93%	Sangat Tinggi
18		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	98,88	99%	Sangat Tinggi
19	Melaksanakan Manajemen resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100%	Sangat Tinggi
20	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100%	Sangat Tinggi
21	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "berAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi,internalisasi,penetapan leader,tim budaya kerja	Kegiatan	4	5	125%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN	IDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KRETERIA PENILAIAN
22	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
23	Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	75,81	76%	Tinggi
24	Tercapainya Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	80,86	81%	Tinggi
25	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100		0%	Belum ada Penilaian Dinas Kesehatan
Rata-rata					Persen	85%	Tinggi
					Persen	85%	Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2023 sebesar 77 dan realisasinya belum didapat karena belum ada evaluasi dari Tim Reviu Inspektorat, sehingga target belum bisa di nilai.

2. Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% (penyampaian dokumen LKPD SKPD 2023), Target kinerja tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Belum optimalnya pengelolaan barang persediaan ;
 - 2) Terbatasnya sumber daya pengelola kegiatan.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Meningkatkan sumber daya aparatur pengelola barang

3. Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-3” tahun 2023 sebesar Nilai 68 dan realisasinya Nilai 77,04 atau capaian kinerja sebesar 113 % (Laporan Kegiatan IKM 2023), Target kinerja melebihi target

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Metode survey masih dilakukan secara manual .
 - 2) Terbatasnya sumber daya pengelola kegiatan.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Meningkatkan sarana dan prasaran kegiatan.
 - 2) Meningkatkan sumber daya aparatur pengelola kegiatan.

4. Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-4” tahun 2023 sebesar 12,11% dan realisasinya 12,11% atau capaian kinerja sebesar 100% (Evaluasi Renja dari E Pantau 2023), Target kinerja tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang ;
 - 2) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi dan ;
 - 3) Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Melaksanakan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;

- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi ;
- 3) Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana dan ;
- 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.

5. Indikator Kinerja ke -5

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-5” tahun 2023 sebesar 13,55% dan realisasinya 13,55% atau capaian kinerja sebesar 100 % (Evaluasi Renja dari E Pantau 2023), Target kinerja tercapai

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
 - 2) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)
 - 3) Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
 - 4) Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
 - 5) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 - 2) Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 - 3) Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya ;
 - 4) Menyusun Dokumen Kontinjensi (Renkon) dan ;
 - 5) Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten

6. Indikator Kinerja ke- 6

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-6 tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% (Evaluasi Renja dari E Pantau 2023), Target kinerja tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Keterbatasan jumlah Aparat Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ;
 - 2) Keterbatasan Sertifikasi keahlian petugas penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - 3) Keterbatasan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan :
 - 4) Belum terbentuknya Tim Reaksi Bencana (TRC) Kabupaten

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Menambah jumlah Relawan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana ;
- 2) Diklat / Bimtek Sertifikasi keahlian petugas penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang memadai dan :
- 4) Membentuk Tim Reaksi Bencana (TRC) Kabupaten

7. Indikator Kinerja ke- 7

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-7 tahun 2023 sebesar 2 Dokumen dan realisasinya 2 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100% (Evaluasi Renja dari E Pantau 2023), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Ketebatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
- 2) Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
- 3) Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat dan :
- 4) Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Meningkatkan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
- 2) Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
- 3) Mempercepat pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah dan :
- 4) Menyusun penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah

8. Indikator Kinerja ke- 8

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-8 tahun 2023 sebesar 3 Temuan dan realisasinya 0 atau capaian kinerja sebesar 0 % (STS Pengembalian 2023), Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Setoran Pembayaran dilakukan secara di angsur

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Setoran Pembayaran segera dibayar lunas.

9. Indikator Kinerja ke- 9

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-9” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 0.atau capaian kinerja sebesar 0, Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Pengurus barang lalai dalam membuat laporan pengelolaan barang daerah

c. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Pembinaan terhadap pengurus barang .

10.Indikator Kinerja ke- 10

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-10” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% (SIRUP 2023), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Proses pengadaan terlambat karena PPTK terlambat menyusun KAK dan RAB.
- 2) Kesalahan dalam penganggaran Barang dan Jasa serta Modal.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) PPTK segera menyusun KAK dan RAB Pengadaan.
- 2) Penganggaran Barang dan Jasa serta Modal mentaati ketentuan dan kebutuhan sesuai RKBMD.

11.Indikator Kinerja ke- 11

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-11” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % (KPK), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- 1) Pegawai belum segera melaporkan LHKPN.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Himbauan kepada pegawai untuk segera melaporkan LHKPN .

12.Indikator Kinerja ke- 12

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-12” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % (SIHARKA), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- 1) Pegawai belum segera melaporkan LHKASN.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Himbauan kepada pegawai untuk segera melaporkan LHKASN.

13.Indikator Kinerja ke- 13

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-13” tahun 2023 sebesar 60-70 (Predikat B) dan realisasinya 60-70 (Predikat B) atau capaian kinerja sebesar 100% (Penilaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- 1) Belum semua pegawai memahami tata kelola kearsipan.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Sosialisasi dan Bimtek tentang tata kelola kearsipan kepada pegawai.

14.Indikator Kinerja ke-14

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-14 tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 % (BECIK dan E Pantau), Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- 1) PPTK sering terlambat pengisian data pada Aplikasi.
- 2) PPTK belum sepenuhnya memahami tata cara pengisian pada Aplikasi.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Himbauan kepada pegawai untuk segera melaporkan data capaian realisasi keuangan dan kinerja di Aplikasi.
- 2) Sosialisasi dan Bimtek tentang tata cara pengisian pada Aplikasi.

15.Indikator Kinerja ke- 15

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-15” tahun 2023 sebesar 1 Inovasi dan realisasinya 0 atau capaian kinerja sebesar 0 % , Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- 1) Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan tidak sesuai dengan fungsi Perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang membidangi urusan bencana Alam dan Non Alam.

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Sasaran membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

16.Indikator Kinerja ke- 16

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-16” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% (LKPD 2023), Target kinerja tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
 - 1) PPTK belum memahami KAK dan RAB.
 - 2) Kesalahan dalam penganggaran Barang dan Jasa serta Modal.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Bimtek/Sosialisasi kepada PPTK tentang Penyusunan KAK dan RKA
 - 2) Penganggaran Barang dan Jasa serta Modal mentaati ketentuan.

17.Indikator Kinerja ke- 17

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-17” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 98,88% atau capaian kinerja sebesar 99% (LKPD SKPD 2023), Target kinerja tidak tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Proses pengadaan terlambat karena PPTK terlambat menyusun KAK dan RAB.
 - 2) Kesalahan dalam penganggaran Barang dan Jasa serta Modal.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) PPTK segera menyusun KAK dan RAB Pengadaan.
 - 2) Penganggaran Barang dan Jasa serta Modal mentaati ketentuan dan kebutuhan sesuai RKBMD.

18.Indikator Kinerja ke- 18

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-18” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 92,71% atau capaian kinerja sebesar 93% (LKPD SKPD 2023), Target kinerja tidak tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
 - 1) PPTK belum memahami KAK dan RAB.
 - 2) Kesalahan dalam penganggaran Barang dan Jasa serta Modal.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Bimtek/Sosialisasi kepada PPTK tentang Penyusunan KAK dan RKA
 - 2) Penganggaran Barang dan Jasa serta Modal mentaati ketentuan.

19.Indikator Kinerja ke- 19

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-19” tahun 2023 sebesar 2 Dokumen dan realisasinya 2 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100% (Dokumen Laporan), Target kinerja tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- 1) PPTK belum memahami Manajemen resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Bimtek/Sosialisasi kepada PPTK tentang Manajemen resiko terhadap program kegiatan di peringkat daerahnya

20.Indikator Kinerja ke- 20

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-20” tahun 2023 sebesar 1 Dokumen dan realisasinya 1 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100% (Dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama BPBD), Target kinerja tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
 - 1) Tidak semua pegawai memahami Indikator Kinerja Utama (IKU) di Perangkat Daerahnya.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Bimtek/Sosialisasi kepada seluruh pegawai BPBD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

21.Indikator Kinerja ke- 21

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-21” tahun 2023 sebesar 4% dan realisasinya 0% atau capaian kinerja sebesar 0% , Target kinerja tidak tercapai.

22.Indikator Kinerja ke- 22

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-22” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 60%.atau capaian kinerja sebesar 60% (Data Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian BPBD 2023), Target kinerja tidak tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu
 - 1) Belum adanya analisa kebutuhan Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah.
 - 2) Belum optimalnya penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK).
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Menyusun analisa kebutuhan Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah.
 - 2) Mengoptimalkan penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK).

23.Indikator Kinerja ke- 23

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-23” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 75,61% atau capaian kinerja sebesar 76% (Aplikasi Bepadah), Target kinerja tidak tercapai.

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang ;
 - 2) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi dan :
 - 6) Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
 - 7) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
 - 8) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)
 - 9) Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
 - 10) Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Melaksanakan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;
 - 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi :
 - 3) Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana dan ;
 - 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
 - 6) Meningkatkan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 - 7) Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 - 8) Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya ;
 - 9) Menyusun Dokumen Kontinjensi (Renkon) dan ;
 - 10) Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten dan :
 - 11) Membentuk Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

24.Indikator Kinerja ke- 24

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-24” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya 80% atau capaian kinerja sebesar 81% (Aplikasi Beppadah), Target kinerja tidak tercapai .

- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
- 1) Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang ;
 - 2) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi :
 - 3) Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana
 - 4) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
 - 5) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)

- 6) Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
 - 7) Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Melaksanakan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;
 - 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi ;
 - 3) Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana ;
 - 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.
 - 5) Meningkatkan Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 - 6) Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 - 7) Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya

25.Indikator Kinerja ke- 25

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-25” tahun 2023 sebesar 100% dan realisasinya belum didapat karena belum ada penilaian dari Dinas Kesehatan.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 85%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 82%. Terjadi peningkatan kinerja sebesar 3%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	69	101%	77	0	0%	Belum ada Penilaian
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu	OPD	100	100	100%	100	100	100%	
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	66	77,04	117%	68	78,55	116%	
Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengendalian kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	12,21	12,21	100%	100	92,2	92%	Sampai September
	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Manajemen Kebakaran	Kelompok	100	100	100%	100	100	100%	Sampai September
	Jumlah Pembentukan Balakarcana (Barisan sukarela pemadam kebakaran)	Kelompok	35,44	35,44	100%	15	10	67%	Sampai September
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Manajemen Kebakaran	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Sampai September
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase layanan informasi Rawan Bencana	Persen	8,11	1,13%	0%	12,11	12,11	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	10,55	8,97	85%	13,55	13,55	100%	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100%	100	100	100%	
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Daerah	Dokumen	2	2	100%	2	2	100%	
Menyelesaikan Tindakan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	3	0	0%	3	0	0%	
Melaksanakan dan Melaporkan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berada di pengguna barang milik daerah	Persen	100	100	0%	100	100	100%	
Melaksanakan Pengelolaan pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efesien,efektif,terbuka dan bersaing,transparan,adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Brang dan Jasa	Persen	100	100	100%	100	100	100%	
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas laporan	Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 maret 2023	Persen	100	100	100%	100	100	100%	
Melaksanakan Tata kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	63,92	91%	B (60-70)	70	100%	
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	100	100	100%	
Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah inovasi	Jumlah	1	0	0%	1	0	0%	Tidak sesuai dengan Tupoksi BPBD
terrealisasinya Output kegiatan tanpa menimbulkan potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100%	100	100	100%	
Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	92,98	93%	100	98	98%	
	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	91,34	91%	100	92,79	93%	
Melaksanakan Manajemen resiko terhadap program kegiatan di peringkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan			0%	2	2	100%	
Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen			0%	1	1	100%	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "berAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi,internalisasi,penetapan leader,tim budaya kerja	Kegiatan			0%	4	5	125%	
Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	persentase pengembangan kompetensi ASN	Persen			0%	100	60	60%	
Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara sesuai Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Persen	100	66,38	66%	100	75,81	76%	
Tercapainya Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persen	100	48,18	48%	100	51,14	51%	
Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin			0%	100		0%	Belum ada Penilaian

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai 77		
Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	12,11%	12,11%	12,11%
Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13,55%	13,55%	13,55%
Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	(6) = (3-5)	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten			Belum ada Reviu Tim Inspektorat
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	82%	18%	
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	75%	25%	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	85%	15%	
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	100%	Program Penanggulangan Bencana	40%	60%	

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program tahun 2023 yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 77 dan realisasinya belum ada karena belum ada Reviu dari Tim Inspektorat.

2) Program Penanggulangan Bencana

Indikator kinerja Program tahun 2023 , yaitu :

1. Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 12,11 dan realisasinya 12,11.atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Sosialisasi Informasi rawan bencana masih kurang ;
- 2) Terbatasnya Sumberdaya Aparatur dalam pelaksanaan sosialisasi dan ;
- 3) Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu Informasi Bencana

b. Solusi/rekomendasinya adalah :

- 1) Melaksanakan Sosialisasi Informasi rawan bencana ;
- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang melaksanakan sosialisasi :
- 3) Peningkatan penyediaan dan pemasangan rambu dan papan informasi bencana dan ;
- 4) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.

2. Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 13,55 dan realisasinya 13,55 atau capaian kinerja sebesar 100%, Target kinerja tidak tercapai.

a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
- 2) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS)

- 3) Keterbatasan Peralatan Penyelamatan Diri bagi masyarakat maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya
 - 4) Belum tersusunnya Dokumen Kontinjensi (Renkon)
 - 5) Belum terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana ;
 - 2) Penyediaan sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) ;
 - 3) Penyediaan peralatan penyelamatan diri bagi masyarakat maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya ;
 - 4) Menyusun Dokumen Kontinjensi (Renkon) dan ;
 - 5) Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten
3. Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100 dan realisasinya 100 atau capaian kinerja sebesar 100 % target kinerja tercapai.
- a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
- 1) Belum optimalnya pelaksanaan dalam penentuan status tanggap darurat ;
 - 2) Belum optimalnya penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 3) Masih rendahnya kapasitas petugas tim kaji cepat ;
 - 4) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang belum mencukupi mengingat luasnya wilayah;
 - 5) Terbatasnya kapasitas petugas pencarian dan penyelamatan;dan
 - 6) Masih kurangnya partisipasi serta kesadaran baik dari tingkat RT, desa/kelurahan, bahkan kecamatan memberikan laporan kejadian bencana.
- b. Solusi/rekomendasinya adalah :
- 1) Peningkatan kapasitas petugas ;
 - 2) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
 - 3) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
 - 4) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
 - 5) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan

- 6) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.
4. Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 dan realisasinya 2 atau capaian kinerja sebesar 100%, Target Kinerja tercapai.
 - a. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - 1) Ketebatasan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
 - 2) Lemahnya Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
 - 3) Pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah masih lambat dan :
 - 4) Belum tersusunnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah
 - b. Solusi/rekomendasinya adalah :
 - 1) Meningkatkan sumberdaya dan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
 - 2) Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah ;
 - 3) Mempercepat pelaksanaan realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana di daerah dan :
 - 4) Menyusun penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77			
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	12,11	12,11	100%	Tata kelola kegiatan baik
Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	13,55	13,55	100%	Tata kelola kegiatan baik
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	100	100	100%	Kesiapsiagaan petugas dan informasi yang akurat
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	2	2	100%	Perda Nomor 10 Tahun 2017 dan Tata Kelola kegiatan yang baik

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41.167.958.037,00	39.116.488.839,00	95%	2.051.469.198,00
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	2.215.000.000,00	1.813.915.442,00	82%	401.084.558,00
Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	1.749.895.550,00	1.304.134.235,00	75%	445.761.315,00
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	1.600.000.000,00	1.359.451.210,00	85%	240.548.790,00
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	500.000.000,00	200.864.142,00	40%	299.135.858,00

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.135.590.766,00	1.043.810.766,00	92%	91.780.000,00
	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				-
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	646.671.584,00	629.255.000,00	97%	17.416.584,00
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	135.355.000,00	135.355.000,00	100%	-
Total			49.150.470.937,00	45.603.274.634,00	93%	3.547.196.303,00

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi anggaran sebesar 90,74 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2022)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.464.350.232	22.321.360.690	95%	1.142.989.542
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana	700.546.000	555.529.781	79%	145.016.219
Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	1.134.294.000	958.950.382	85%	175.343.618
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana	1.550.000.000	1.286.078.750	83%	263.921.250
Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah	Penanggulangan Bencana	1.857.514.400	1.237.906.323	67%	619.608.077
Meningkatnya kualitas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	825.000.000	713.444.440	86%	111.555.560
	Persentase Layanan Pemadaman,	Pencegahan, Penanggulangan,	1.215.039.638	1.128.918.167	93%	86.121.471

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.545.000.000	1.283.427.370	83%	261.572.630
Meningkatnya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	200.000.000	191.310.028	96%	8.689.972
Total			32.491.744.270	29.676.925.931	91,34%	2.814.818.339

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 1,44%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 rata-rata sebesar 85%(Tinggi), dengan rincian :

- 1) Capaian kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target sebesar 77 dan realisasinya belum didapat karena belum ada Reviu dari Tim Inspektorat.
- 2) Capaian kinerja Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu dengan target sebesar 100% dan realisasinya. 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 3) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 67% dan realisasinya. 77,47% atau capaian kinerja sebesar 113%. Target kinerja melebihi target.
- 4) Capaian kinerja Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dengan target sebesar 12,11% dan realisasinya. 12,11% .atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 5) Capaian kinerja Persentase Layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target kinerja sebesar 13,55% dan realisasinya 13,55% atau capaian kinerja sebesar 100% , Target kinerja tidak tercapai.
- 6) Capaian kinerja Persentase Layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target kinerja sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.
- 7) Capaian kinerja Jumlah Dokumen Regulasi penanggulangan Bencana di daerah dengan target kinerja sejumlah 2 Dokumen dan realisasinya 2 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100 % , target kinerja tercapai
- 8) Capaian kinerja Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di Tindak Lanjuti .dengan target kinerja sejumlah 3 Dokumen dan realisasinya 0 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 0 % , target kinerja tidak tercapai
- 9) Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Berada di pengguna barang milik daerah dengan target kinerja sejumlah

100% dan realisasinya 100% Dokumen atau capaian kinerja sebesar 10 %, target kinerja tercapai

- 10) Capaian kinerja Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 10 %, target kinerja tercapai
- 11) Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2023 dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 %, target kinerja tercapai.
- 12) Capaian kinerja Tingkat Kepatuhan serta kelengkapan LHKASN pertanggal 31 Maret 2023 dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 %, target kinerja tercapai.
- 13) Capaian kinerja Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.dengan target kinerja sejumlah B (60-70) dan realisasinya 70 Baik atau capaian kinerja sebesar 100 %, target kinerja tercapai.
- 14) Capaian kinerja Persentase Keterisian Data di Aplikasi satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100 %, target kinerja tercapai.
- 15) Capaian kinerja Jumlah inovasi dengan target kinerja sejumlah 1 Inovasi dan realisasinya 0 atau capaian kinerja sebesar 0, target kinerja tidak tercapai.
- 16) Capaian kinerja Capaian Output Kegiatan dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%, target kinerja tercapai.
- 17) Capaian kinerja Persentase realisasi kegiatan fisik dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 98,88% atau capaian kinerja sebesar 99%, target kinerja tidak tercapai.
- 18) Capaian kinerja Persentase realisasi keuangan dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 92,71% atau capaian kinerja sebesar 93%, target kinerja tidak tercapai.
- 19) Capaian kinerja Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari dengan target kinerja sejumlah 2 Laporan dan realisasinya 2 Laporan atau capaian kinerja sebesar 100%, target kinerja tercapai.

- 20) Capaian kinerja Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama dengan target kinerja sejumlah 1 Dokumen dan realisasinya 1 Dokumen atau capaian kinerja sebesar 100%, target kinerja tercapai.
- 21) Capaian kinerja Jumlah kegiatan sosialisasi,internalisasi,penetapan leader,tim budaya kerja dengan target kinerja sejumlah 4 Kegiatan dan realisasinya 5 Kegiatan atau capaian kinerja sebesar 125%, target kinerja melebihi target.
- 22) Capaian kinerja persentase pengembangan kompetensi ASN dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 60% atau capaian kinerja sebesar 60%, target kinerja tidak tercapai.
- 23) Capaian kinerja Persentase Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 75,81% atau capaian kinerja sebesar 76%, target kinerja tidak tercapai.
- 24) Capaian kinerja Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya 80,86% atau capaian kinerja sebesar 76%, target kinerja tidak tercapai.
- 25) Capaian kinerja Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran dengan target kinerja sejumlah 100% dan realisasinya belum bisa didapat karena belum ada penilaian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas Aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan dan pembinaan relawan.
- 3) Meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dengan mengoptimalkan dokumen kajian risiko bencana dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Melakukan pendataan kebutuhan standar pelayanan informasi rawan bencana.
- 5) Menyusun Standarisasi Penyebaran Informasi Bencana.

- 6) Meningkatkan pengadaan dan pemasangan papan rambu informasi, peringatan dan larangan bencana yang berstandarisasi
- 7) Memperbaiki tata kelola kegiatan.
- 8) Mengoptimalkan Pelaksanaan dalam tahapan penentuan status Tanggap Darurat ;
- 9) Mengoptimalkan Penerapan sistem komando operasi darurat ;
- 10) Optimalisasi Tim Kaji Cepat;
- 11) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan logistik kebencanaan ; dan
- 12) Menerapkan sistem Penyimpanan yang terpadu pada pergudangan Logistik PB.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, 23 Februari 2024

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara



Setianto Nugroho Aji, SH., M. Si
Pembina Utama Muda (IV/e)
NIP. 19671027 199403 1 008

LAMPIRAN – LAMPIRAN

MATRIK RENSTRA

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Ssaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2023		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPBD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	B	B	16.408.683.145	B	16.281.183.145	B+	16.831.183.145	B+	16.281.183.145	B+	16.705.372.296	B+	82.507.604.876		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	45	2.250.000.000		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	35	1.000.000.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	114	114	9.701.750.195	114	9.701.750.195	114	9.701.750.195	114	9.701.750.195	114	9.475.939.346	570	48.282.940.126		
		Penyediaan Gaji dannTunjangan ASN	Jumlah ASN Yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	88	88	9.261.750.195	88	9.261.750.195	88	9.261.750.195	88	9.261.750.195	88	9.035.939.346	440	46.082.940.126		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Waktu penatausahaan dan pengujian / Verifikasi	Bulan	14	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	14	80.000.000	70	400.000.000		

		Keuangan SKPD	Keuangan SKPD																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan	12	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	12	360.000.000	60	1.800.000.000		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	175	340.000.000	25	150.000.000	175	400.000.000	25	150.000.000	175	400.000.000	575	1.440.000.000		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang Diadakan	Unit	150	150	250.000.000	0	-	150	300.000.000	0	-	150	300.000.000	450	850.000.000		
		Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Orang	-	-	-	15	150.000.000	-	-	15	150.000.000	-	-	30	300.000.000		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	25	25	90.000.000	-	-	25	100.000.000	-	-	25	100.000.000	75	290.000.000		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	-	-	-	10	150.000.000	-	-	10	150.000.000	-	-	20	300.000.000		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	150	150	843.500.000	150	933.500.000	150	933.500.000	150	933.500.000	150	933.500.000	750	4.577.500.000		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	100	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	100	10.500.000	500	52.500.000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	1700	1700	110.000.000	1700	110.000.000	1700	110.000.000	1700	110.000.000	1700	110.000.000	8500	550.000.000		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jenis	120	120	50.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	120	65.000.000	600	310.000.000		

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis/Porsi/Kotak	2890	2890	75.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.000	2890	100.000.000	14450	475.000.000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Buku/Lembar/Buah	7500	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	7500	85.000.000	37500	425.000.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan advetorial yang disediakan	Eksemplar/Buku/Kali	2190	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	2190	58.000.000	10950	290.000.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/Kali	35	35	330.000.000	35	330.000.000	35	330.000.000	35	330.000.000	35	330.000.000	175	1.650.000.000		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengelolaan arsip (UPPA) serta pada Unit kearsipan (UK)	Berkas	100	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	475.000.000		
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat daerah	Sistem/Aplikasi	12	12	50.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	60	350.000.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit/Kali	165	50	200.000.000	90	150.000.000	200	450.000.000	90	150.000.000	215	550.000.000	645	1.500.000.000		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	90	-	-	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	90	150.000.000	360	600.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit/Kali	75	50	200.000.000	-	-	110	300.000.000	-	-	125	400.000.000	285	900.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	4.193.432.950	12	4.155.932.950	12	4.155.932.950	12	4.155.932.950	12	4.155.932.950	60	20.817.164.750		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Bulan	990	990	5.000.000	990	7.500.000	990	7.500.000	990	7.500.000	990	7.500.000	4950	35.000.000		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	12	12	298.000.000	12	258.000.000	12	258.000.000	12	258.000.000	12	258.000.000	60	1.330.000.000		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Bulan	12	12	3.890.432.950	12	3.890.432.950	12	3.890.432.950	12	3.890.432.950	12	3.890.432.950	60	19.452.164.750		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit/Kali	150	140	680.000.000	150	740.000.000	150	740.000.000	150	740.000.000	150	740.000.000	740	3.640.000.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak	Unit	90	80	600.000.000	90	650.000.000	90	650.000.000	90	650.000.000	90	650.000.000	440	3.200.000.000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit/Kali	60	60	80.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	300	440.000.000		

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan , Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	5,11	8,1	3.025.000.000	12,1	3.215.000.000	15,1	3.225.000.000	18,1	3.200.000.000	21,1	3.175.000.000	24,61	15.840.000.000	BPB D	
	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2) Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen	8,5	10,6		13,6		16,6		19,6		22,6		29,1			
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3) Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100		100		100		100		100		100			
			4) Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokumen	0	2		2		2		2		2		10			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	persen	5,11	8,1	150.000.000	12,1	150.000.000	15,1	200.000.000	18,1	150.000.000	21,1	150.000.000	24,61	800.000.000		
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (lanjutan)	jumlah dokumen	Dokumen	1	-	-	-	-	1	200.000.000					1	200.000.000		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi	Orang	-	150	150.000.000	150	150.000.000	-	-	150	150.000.000	150	150.000.000	600	600.000.000		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persen	8,5	10,6	925.000.000	13,6	965.000.000	16,6	925.000.000	19,6	950.000.000	22,6	925.000.000	29,10	4.690.000.000		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000			1	300.000.000		
		Pelatihan Dan Pencegahan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan	Orang	-	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000		-	150	150.000.000	600	600.000.000		
		Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah status tanggap darurat bencana	status	-	1	150.000.000	1	-		150.000.000		-	1	150.000.000	3	450.000.000		

		Penyediaan Peralatan Dan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Bencana	Jenis	-	30	175.000.000		-	30	175.000.000		-	30	175.000.000	90	525.000.000		
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana di daerah	bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0	-		
		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Destana	12	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.000.000.000		
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana	kejadian		20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	500.000.000		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	Dokumen		1	150.000.000	1	200.000.000	1		1	200.000.000	1	-	5	550.000.000		
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah Peserta Gladi	Orang	-	-	-	100	15.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	400	465.000.000		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB	Dokumen	-	-	-	1	300.000.000	-	-	-	-	-	-	1	300.000.000		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	-	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	6.750.000.000		
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	persen	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000		
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	persen	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	persen	100%	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	2.250.000.000		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu respon kurang dari 24 jam Penyediaan Logstik untuk setiap status darurat bencana (%)	persen	100%	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000		

		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	persen	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000		
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Waktu respon kurang dari 24 jam untuk setiap bencana non alam epidemi/wabah penyakit (%)	persen	-	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.250.000.000		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4) Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	Dokumen	-	2	600.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	10	3.600.000.000		
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Penyusunan perub RAD PB, sumber daya bantuan PB dll.	Dokumen	-	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Risiko Bencanana	Forum	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000		
		Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan sinergi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam penaggulangan bencana.	kegiatan	-	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000		
		Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Sistim informasi geografis (SIG),	sistem	-	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	10	750.000.000		
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.Pengawasan sumber ancaman / bahaya.2 pengawasan kegiatan rancang bangun dan tata ruang.3 pengawasan pengelolaan keuangan / pendanaan penanggulangan bencana.4 pengawasan kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. 5. pengawasan kegiatan reklamasi.	kegiatan	-	3	150.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	15	1.350.000.000		
Meningkatny a Kualitas Pelayanan Penanggula ngan	Meningkatny a penyelengga raan operasi pencarian	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	10,86	12,21 %	3.265.039.638	15,80%	3.240.039.638	17,55%	3.490.039.638	19,25%	3.490.039.638	20,12%	3.240.039.638	27,26%	16.725.198.190		

Kebakaran	dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			3) Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)		33,76%	35,44 %		41,77%		50,21%		60,76%		73,42%		73,42%			
			4) Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia		100	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	10,86	12,21 %	2.040.039.638	15,80%	2.040.039.638	17,55%	2.290.039.638	19,25%	2.040.039.638	20,12%	2.040.039.638	27,26%	10.450.198.190		
			2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100	100%		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %						
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani	Jumlah Kasus	76	20%	825.000.000	20%	825.000.000	20%	825.000.000	20%	825.000.000	20%	825.000.000	100%	4.125.000.000		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian kebakaran	Jumlah Korban	74	20%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	200.000.000	20%	200.000.000	100%	1.000.000.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	unit		120	690.039.638	75	690.039.638	110	690.039.638	75	690.039.638	110	690.039.638	490	3.450.198.190		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Apartur Pemadam yang dibina	orang		100	125.000.000		125.000.000	50	125.000.000		125.000.000	50	125.000.000	200	625.000.000		
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1.tersediannya sistem						1	250.000.000					1	250.000.000		

		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terwujudnya kerjasama antar wilayah perbatasan	wilayah			200.000.000	1	200.000.000	2	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
		Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	2) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	persen			-		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	-	600000000,0		
		Pendataan Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana protksi kebakaran yang didata	Unit			-	100	150.000.000			100	150.000.000			200	300.000.000		
		Penilaian Sarana Dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan prasarana protksi kebakaran yang dinilai	Unit			-			100	150.000.000			100	150.000.000	200	300.000.000		
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	persen	33,76%	35,44 %	1.025.000.000	41,77%	850.000.000	50,21%	850.000.000	60,76%	850.000.000	73,42%	850.000.000	73,42%	4.425.000.000		
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran	Kelompok Balakarcana	46	7	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	47	1.750.000.000		
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk	Kelompok Balakarcana	72	4	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	44	1.000.000.000		
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	unit	6	9	475.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	29	1.675.000.000		
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	3) Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	persen		100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	450.000.000	100%	200.000.000	100%	1.250.000.000		

		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Persentase Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia yang tertangani	persen			25%	200.000.000	25%	200.000.000	25%	200.000.000	25%	200.000.000	100%	800.000.000			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian Pertolongan terhadap kondisi membahayakan	Unit		50	200.000.000	100			100	250.000.000			250	450.000.000			
	Jumlah						22.698.722.783		22.736.222.783		23.546.222.783		22.971.222.783		23.120.411.934		115.072.803.066		

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

PERIODE Desember - TAHUN 2023

1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		CAPAIAN PER TRIWULAN								TOTAL			STATUS PELAKSANAAN (%)
				I		II		III		IV					
		K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	%.	
1.05.1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota															
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp300.000.000		Rp33.058.000		Rp81.757.500		Rp0		Rp174.749.000		Rp289.564.500		96,52%	
1	1.05.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	1	Dokumen	9	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp175.000.000		Rp20.375.000		Rp39.664.830		Rp0		Rp114.053.903		Rp174.093.733		99,48%	
2	1.05.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp150.000.000		Rp0		Rp23.640.000		Rp37.350.000		Rp62.440.000		Rp123.430.000		82,29%	
3	1.05.01.2.01.07.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp12.910.203.097		Rp3.328.326.777		Rp4.204.523.828		Rp3.164.578.214		Rp1.416.697.265		Rp12.114.126.084		93,83%	
4	1.05.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.121	Orang/Bulan	354	Orang/Bulan	371	Orang/Bulan	379	Orang/Bulan	146	Orang/Bulan	1.250	Orang/Bulan	111,51%	100,00%
1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp86.000.000		Rp7.645.000		Rp47.434.505		Rp0		Rp19.152.715		Rp74.232.220		86,32%	
5	1.05.01.2.02.03.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	12	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp334.949.000		Rp40.070.000		Rp105.629.090		Rp0		Rp119.850.000		Rp265.549.090		79,28%	
6	1.05.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1.05.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp180.000.000		Rp6.940.000		Rp34.431.500		Rp45.502.000		Rp85.089.720		Rp171.963.220		95,54%	
7	1.05.01.2.03.04.01 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	2	Laporan	6	Laporan	66,67%	100,00%

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Rp1.562.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp1.542.750.000		Rp1.542.750.000		98,77%
8	1.05.01.2.05.02.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	365	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0,00% 100,00%
1.05.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Rp72.025.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp57.383.500		Rp57.383.500		79,67%
9	1.05.01.2.05.04.01 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00% 100,00%
1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp127.715.120		Rp127.715.120		85,14%
10	1.05.01.2.05.09.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	15	Orang	15	Orang	100,00% 100,00%
1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp66.000.000		Rp0		Rp4.840.000		Rp15.639.220		Rp5.438.220		Rp25.917.440		39,27%
11	1.05.01.2.05.10.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	90	Orang	10	Orang	20	Orang	30	Orang	150	Orang	100,00% 100,00%
1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan		Rp150.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp148.759.920		Rp148.759.920		99,17%
12	1.05.01.2.05.11.02 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan	10	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	8	Orang	8	Orang	80,00% 100,00%

1.05.01.2.06 Adminstrasi Umum Perangkat Daerah														
1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Rp90.000.000		Rp0		Rp9.924.000		Rp0		Rp77.218.000		Rp87.142.000		96,82%
13	1.05.01.2.06.01.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	0	Paket	0	Paket	7	Paket	5	Paket	12	Paket	100,00%
1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp213.540.000		Rp0		Rp0		Rp169.344.250		Rp39.536.000		Rp208.880.250		97,82%
14	1.05.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket	0	Paket	0	Paket	2	Paket	5	Paket	7	Paket	100,00%
1.05.01.2.06.03 Penyediaan peralatan Rumah Tangga		Rp30.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp28.673.500		Rp28.673.500		95,58%
15	1.05.01.2.06.03.03 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	120	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	100	Paket	100	Paket	83,33%
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp140.000.000		Rp0		Rp18.136.000		Rp0		Rp103.678.000		Rp121.814.000		87,01%
16	1.05.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.000	Paket	0	Paket	150	Paket	0	Paket	600	Paket	750	Paket	75,00%
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp39.787.500		Rp24.001.200		Rp63.788.700		85,05%
17	1.05.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang disediakan	24	Paket	0	Paket	0	Paket	14	Paket	10	Paket	24	Paket	100,00%

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan SKPD		Rp550.000.000		Rp80.135.000		Rp130.772.399		Rp61.570.000		Rp205.109.527		Rp477.586.926		86,83%	
18	1.05.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kosnultasi SKPD	50	Laporan	14	Laporan	15	Laporan	10	Laporan	11	Laporan	50	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp225.000.000		Rp0		Rp0		Rp16.000.000		Rp105.773.120		Rp121.773.120		54,12%	
19	1.05.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	50	Dokumen	120	Dokumen	170	Dokumen	85,00%	100,00%
1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp75.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp37.862.280		Rp37.862.280		50,48%	
20	1.05.01.2.06.11.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	70,00%	100,00%
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp4.645.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp4.627.499.091		Rp4.627.499.091		99,62%	
21	1.05.01.2.07.02.01 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang telah disediakan	26	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	26	Unit	26	Unit	100,00%	100,00%
1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel		Rp520.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp516.555.000		Rp516.555.000		99,34%	
22	1.05.01.2.07.05.01 Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	50	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	40	Paket	40	Paket	80,00%	100,00%

1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp10.224.820.000		Rp0		Rp74.988.800		Rp3.829.013.600		Rp5.923.118.339		Rp9.827.120.739		96,11%	
23	1.05.01.2.07.11.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	186	Unit	0	Unit	48	Unit	75	Unit	0	Unit	123	Unit	66,13%	100,00%
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp350.000.000		Rp69.503.820		Rp34.287.297		Rp41.210.073		Rp74.586.489		Rp219.587.679		62,74%	
24	1.05.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp3.331.922.136		Rp940.403.672		Rp963.519.968		Rp1.014.920.736		Rp161.989.695		Rp3.080.834.071		92,46%	
25	1.05.01.2.08.04.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	12	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		Rp2.222.860.000		Rp0		Rp822.878.646		Rp411.152.785		Rp943.997.491		Rp2.178.028.922		97,98%	
26	1.05.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70	Unit	0	Unit	10	Unit	15	Unit	40	Unit	65	Unit	92,86%	100,00%

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Rp175.000.000		Rp0		Rp14.557.000		Rp54.758.000		Rp33.960.000		Rp103.275.000		59,01%	
27	1.05.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	Unit	0	Unit	10	Unit	25	Unit	10	Unit	45	Unit	90,00%	100,00%
1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp1.295.470.720		Rp0		Rp224.229.607		Rp105.269.904		Rp917.210.127		Rp1.246.709.638		96,24%	
28	1.05.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	0	Unit	2	Unit	2	Unit	7	Unit	11	Unit	91,67%	100,00%
RATA-RATA													89,01%	100,00%	
PREDIKAT													TINGGI	SANGAT TINGGI	
1.05.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana															
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota															
1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)		Rp2.215.000.000		Rp17.890.000		Rp205.238.592		Rp98.407.987		Rp1.136.391.110		Rp1.457.927.689		65,82%	
29	1.05.03.2.01.02.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	3.322	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	3.322	Orang	3.322	Orang	100,00%	100,00%

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Rp900.000.000		Rp8.360.000		Rp116.390.000		Rp248.569.035		Rp326.580.960		Rp699.899.995		77,77%	
30	1.05.03.2.02.02.01 Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	400	orang	0	orang	225	orang	0	orang	0	orang	225	orang	56,25%	75,00%
1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Rp149.999.750		Rp2.830.000		Rp0		Rp14.130.000		Rp132.345.600		Rp149.305.600		99,54%	
31	1.05.03.2.02.03.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	100,00%
1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Rp149.895.800		Rp0		Rp0		Rp0		Rp146.130.215		Rp146.130.215		97,49%	
32	1.05.03.2.02.04.01 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	12	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	12	Unit	12	Unit	100,00%	100,00%
1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Rp150.000.000		Rp0		Rp25.930.000		Rp54.849.985		Rp48.678.970		Rp129.458.955		86,31%	
33	1.05.03.2.02.06.01 Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4	Kawasan	0	Kawasan	1	Kawasan	3	Kawasan	0	Kawasan	4	Kawasan	100,00%	100,00%

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Rp150.000.000		Rp0		Rp17.900.000		Rp20.530.000		Rp66.390.524		Rp104.820.524		69,88%		
34	1.05.03.2.02.07.01 Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	12	Laporan	0	Laporan	3	Laporan	1	Laporan	3	Laporan	6	Laporan	53,17%		72,00%
1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi		Rp250.000.000		Rp0		Rp0		Rp32.317.720		Rp136.291.400		Rp168.609.120		67,44%		
35	1.05.03.2.02.09.01 Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%		100,00%
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																
1.05.03.2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Rp100.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp92.090.980		Rp92.090.980		92,09%		
36	1.05.03.2.03.01.01 Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah zoonosis prioritas	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00%		100,00%
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Rp150.000.000		Rp0		Rp28.342.940		Rp20.991.000		Rp91.085.145		Rp140.419.085		93,61%		
37	1.05.03.2.03.02.01 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%		100,00%

1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp400.000.000		Rp0		Rp147.057.460		Rp78.100.000		Rp169.720.825		Rp394.878.285		98,72%	
38	1.05.03.2.03.03.01 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792	Orang	6	Orang	51	Orang	3.744	Orang	1	Orang	3.802	Orang	18,29%	100,00%
1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Rp750.000.000		Rp0		Rp0		Rp184.189.500		Rp444.754.010		Rp628.943.510		83,86%	
39	1.05.03.2.03.04.01 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273	Orang	0	Orang	0	Orang	310	Orang	67	Orang	377	Orang	138,10%	100,00%
1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Rp100.000.000		Rp0		Rp70.333.000		Rp0		Rp18.133.900		Rp88.466.900		88,47%	
40	1.05.03.2.03.05.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00%	100,00%
1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Rp100.000.000		Rp0		Rp12.260.000		Rp0		Rp2.392.450		Rp14.652.450		14,65%	
41	1.05.03.2.03.06.01 SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	100,00%

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana														
1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp80.000.000		Rp0		Rp23.130.900		Rp0		Rp26.328.252		Rp49.459.152		61,82%
42	1.05.03.2.04.01.01 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	87,00% 65,00%
1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Rp80.000.000		Rp0		Rp5.990.000		Rp0		Rp17.100.750		Rp23.090.750		28,86%
43	1.05.03.2.04.02.01 Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	55,00% 70,00%
1.05.03.2.04.03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Rp80.000.000		Rp0		Rp4.100.000		Rp13.671.200		Rp42.748.800		Rp60.520.000		75,65%
44	1.05.03.2.04.03.01 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	26,25% 80,00%
1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi		Rp130.000.000		Rp0		Rp0		Rp0		Rp6.120.000		Rp6.120.000		4,71%
45	1.05.03.2.04.04.01 Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	4,00% 26,00%
1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Rp130.000.000		Rp0		Rp0		Rp6.990.000		Rp54.684.240		Rp61.674.240		47,44%
46	1.05.03.2.04.05.01 Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	110,00% 70,00%
RATA-RATA													80,45%	86,56%
PREDIKAT													TINGGI	TINGGI

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Bidang / Program / Indikator	VOLUME		CAPAIAN		
		K	Satuan	K	Satuan	Bulan
1.05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
1.05.1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	1.05.01.01 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	77	Nilai	78	Nilai	Desember
1.05.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana						
2	1.05.03.01 Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	12	Persen	12,11	Persen	Desember
1.05.1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
3	1.05.04.01 Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100	Persen	92,2	Persen	September
1.05.1.05.03 Program Penanggulangan Bencana						
4	1.05.03.02 Cakupan Pencegahan Bencana Daerah dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	14	Persen	13,55	Persen	Desember
5	1.05.03.03 Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Persen	100	Persen	Desember
6	1.06.03.04 Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	5	Dokumen	5	Dokumen	Desember
1.05.1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran						
7	1.05.04.02 Persentase Pembentukan Balakar (Relawan Pemadam Kebakaran)	15	Kelompok	10	Kelompok	September
8	1.05.04.03 Persentase Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100	Persen	100	Persen	September

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

bidang	jenis layanan dasar	mutu pelayanan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					73.63%			55.98%			79.55%			75.81%
	*Kategori Bencana Daerah				73.63%			55.98%			79.55%			75.81%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana				60.45%			33.97%			78.25%			78.21%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		765284	386986	50.57%	778096	135858	17.46%	782634	569884	72.82%	782634	569485	72.77%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				100.00%			100.00%			100.00%			100.00%
		1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal	18	18	100.00%	18	18	100.00%	18	18	100.00%	1	1	100.00%
		2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara	765.284	765.284	100.00%	778.096	778.096	100.00%	569.884	569.884	100.00%	569.485	569.485	100.00%

bidang	jenis layanan dasar	mutu pelayanan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
		di kawasan rawan bencana												
		3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	-1	-1	100.00%	8.955	8.955	100.00%	5.519	5.519	100.00%	6.154	6.154	100.00%
		4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	1	1	100.00%	-1	-1	100.00%	15	15	100.00%	146	146	100.00%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				60.45%			33.97%			60.40%			49.22%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		765284	386986	50.57%	778096	135858	17.46%	782634	395209	50.50%	782634	285900	36.53%
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				100.00%			100.00%			100.00%			100.00%

bidang	jenis layanan dasar	mutu pelayanan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
		1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	100	100	100.00%	-1	-1	100.00%	302	302	100.00%	407	407	100.00%
		2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	94	94	100.00%	900	900	100.00%	285	285	100.00%	405	405	100.00%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100.00%			100.00%			100.00%			100.00%
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		6	6	100.00%	51	51	100.00%	3791	3791	100.00%	3802	3802	100.00%

bidang	jenis layanan dasar	mutu pelayanan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
	Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar (20%)				100.00%			100.00%			100.00%			100.00%
		1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	-1	-1	100.00%	-1	-1	100.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%
		2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	6	6	100.00%	57	57	100.00%	780	780	100.00%	3.802	3.802	100.00%
		3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	-1	-1	100.00%	-1	-1	100.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%

bidang	jenis layanan dasar	mutu pelayanan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian	jumlah yang harus dilayani	Jumlah Yang Terlayani	% Capaian
		4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) *Diisikan -1/-1 Jika Kondisi Belum Terpenuhi	-1	-1	100.00%	-1	-1	100.00%	-1	-1	100.00%	-1	-1	100.00%
		5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	21	21	100.00%	52	52	100.00%	143	143	100.00%	144	144	100.00%

**REALISASI ANGGARAN KEGIATAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PADA BPBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023**

kode rekening				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu APBD	Pagu APBD-P	Bertambah / Berkurang	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
								Realiasi	Total Realiasi	%	Realiasi	Total Realiasi	%	Realiasi	Total Realiasi	%	Realiasi	Total Realiasi	%
3				PENANGGULANGAN BENCANA	3.449.895.550	5.564.895.550	2.115.000.000	10.280.000	10.280.000		506.886.960	517.166.960		2.193.388.353	2.710.555.313		4.455.450.887	4.455.450.887	80,06
	2.01			PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	1.000.000.000	2.215.000.000	1.215.000.000	0	0		140.587.500	140.587.500		715.123.138	855.710.638		1.813.915.442	1.813.915.442	81,89
		1.05.03.2.01.02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.000.000.000	2.215.000.000	1.215.000.000	0	0%		140.587.500	140.587.500	14.06%	715.123.138	855.710.638	85.57%	1.813.915.442	1.813.915.442	81,89
	2.02			PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.449.895.550	1.749.895.550	300.000.000	10.280.000	10.280.000		249.680.000	259.960.000		970.242.315	1.230.202.315		1.282.084.235	1.282.084.235	73,27
		1.05.03.2.02.02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	900.000.000	900.000.000	0	8.360.000	8.360.000	0.93%	247.760.000	256.120.000	28.46%	495.405.325	751.525.325	83.50%	584.695.635	584.695.635	64,97
		1.05.03.2.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	149.999.750	149.999.750	0	1.920.000	1.920.000	1.28%	1.920.000	3.840.000	2.56%	122.529.750	126.369.750	84.25%	139.345.600	139.345.600	92,90
		1.05.03.2.02.04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	149.895.800	149.895.800	0	0	0%		0	0	0%	134.769.240	134.769.240	89.91%	146.130.225	146.130.225	97,49
		1.05.03.2.02.09		Penyusunan Rencana Kontijensi	250.000.000	250.000.000	0	0	0%		0	0	0%	217.538.000	217.538.000	87.02%	168.753.320	168.753.320	67,50
		1.05.03.2.02.06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	150.000.000	150.000.000	0	0%		0		0%	0		0%	138.338.931	138.338.931	92,23
		1.05.03.2.02.07		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	0	150.000.000	150.000.000	0	0%		0		0%	0		0%	104.820.524	104.820.524	69,88

		2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	1.000.000.000	1.600.000.000	600.000.00 0	0	0		116.619.46 0	116.619.46 0		508.022.900	624.642.36 0		1.359.451.2 10	1.359.451.210	84,97
			1.05.03.2.03.0 1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0%	0		0%	0		0%	92.090.980	92.090.980	92,09
			1.05.03.2.03.0 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0%	10.880.000	10.880.000	7.25 %	28.342.940	39.222.940	26.15%	140.419.08 5	140.419.085	93,61
			1.05.03.2.03.0 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	400.000.000	400.000.000	0	0	0	0%	105.739.46 0	105.739.46 0	26.43 %	225.157.460	330.896.92 0	82.72%	394.878.28 5	394.878.285	98,72
			1.05.03.2.03.0 4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	250.000.000	750.000.000	500.000.00 0	0	0	0%	0		0%	184.189.500	184.189.50 0	73.68%	628.943.51 0	628.943.510	83,86
			1.05.03.2.03.0 5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0%	0		0%	70.333.000	70.333.000	70.33%	88.466.900	88.466.900	88,47
			1.05.03.2.03.0 6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	0	100.000.000	100.000.00 0	0		0%	0		0%	0		0%	14.652.450	14.652.450	14,65

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) URUSAN BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023**

No	Urusan	Bidang	IKK Output		IKK Outcome	Rumus	Target RPJMD	Capaian	Keterangan	Telah Input
1.e.3	Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 699.681	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	89,4	Tidak Tercapai	Telah Melakukan Upload
					2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 782.634	----- x 100 %				
					A/B*100 = 89.40079270770245	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan				
			2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	657453 Jiwa						
1.e.4	Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 416.096	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	53,17	Tidak Tercapai	Telah Melakukan Upload
					2. Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana = 782.634	----- x 100 %				
					A/B*100 = 53.16610318488591	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana				
			2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen						
			3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	10 Orang						

			4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	395 Orang						
			5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	-						
			6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	-						
1.e.5	Wajib Pelayanan Dasar	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Tidak ada Kejadian KLB	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 3.802 2. Jumlah Warga Negara yang menjadi korban bencana = 3.802 A / B * 100 = 100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100 % Jumlah Warga Negara yang menjadi korban bencana	100	100	Tercapai	Telah Melakukan Upload
			2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%						
			3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%						
			4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%						

**REKAPITULASI BENCANA PER KECAMATAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023**

NO	KECAMATAN	JENIS BENCANA													Jumlah Kejadian Bencana Per Kecamatan	Jumlah Kej.Benc.yang dilayani / dilakukan
		Kekeringan (Suplay air)	Kebakaran Lahan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Puting Beliung	Kecelakaan Trans. Air	Kecelakaan Trans. Darat	Orang Hilang / Tenggelam	Konflik Sosial	Pohon Tumbang	Gempa Bumi	Tsunami	Lain-Lain		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tenggarong	1	8	1		1		1	1		12			8	33	33
2	Tenggarong Seberang	2	4					1	3		6			1	17	17
3	Loa Kulu	24	3											1	28	28
4	Loa Janan		2						2						4	4
5	Sanga-Sanga		1						3						4	4
6	Anggana								3						3	3
7	Muara Badak													2	2	2
8	Marang Kayu														0	0
9	Samboja		12		1		1		2					2	18	18
10	Samboja Barat		17												17	17
11	Muara Jawa		1				1		4						6	6
12	Sebulu		1												1	1
13	Muara Kaman		7												7	7
14	Kota Bangun								2						2	2
15	Muara Muntai														0	0
16	Muara Wis		1												1	1
17	Kenohan		1												1	1
18	Kembang Janggut														0	0
19	Tabang														0	0
Jumlah Kab. Kutai Kartanegara		27	58	1	1	1	2	2	20	0	18	0	0	14	144	144

**DAFTAR REKAPITULASI DATA BENCANA BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No.	Jenis Bencana / Kejadian	Banyaknya kejadian bencana yang dilayani / ditangani	Jumlah Korban				Korban Meninggal	Hutan/Lahan/ Kebun (Ha)	Taksiran Kerugian (Rp)
			Kendaraan	Bangunan	Jiwa	KK			
1	Kekeringan (Suplay air)	27			3.721	711			
2	Kebakaran lahan	58						350,3	
3	Tanah Longsor	1							
4	Angin Puting Beliung	1		1					
5	Banjir	1							
6	Kecelakaan Darat	2			2	2			
7	Kecelakaan Air	2			2	2			
8	Orang Hilang & Tenggelam	20			38	38	8		
9	Pohon Tumbang	18							
10	Lain-Lain (back up kebakaran,evakuasi jenazah, dll)	14		25	39	36	2		
Jumlah		144	0	26	3802	789	10	350,3	

Tenggarong, 31 Desember 2023
Kepala Pelaksana BPBD

Setianto Nugroho Aji. S.H. M.Si
Nip. 19671027 199403 1 008



Dokumentasi Pra Bencana





Dokumentasi Saat Tangap Darurat Dokumentasi Kegiatan Tanggap Darurat



Dokumentasi Kegiatan Pasca Bencana





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN RISIKO DAN PELAKSANAAN RENCANA
TINDAK PENGENDALIAN (RTP) RISIKO
TAHUN 2023**



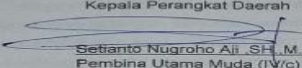
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Jl. AP. Mangkunegoro No. 3 Kel. Timbau Telp. (0541) 661009, fax (0541) 661009 Kec. Tenggarong
Website : <http://bpbd.kutakab.go.id> mail : bpbdkutai@gmail.com Kode Pos 7551



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP. Mangkunegoro No.3 Kel. Timbau Telp. (0541) 661009, fax (0541) 661009
 Kec. Tenggarong Website : <http://bpbd.kukartab.go.id>
 E-mail : bpbdkutai@gmail.com Kode Pos 75511

Nomor : B.3877/Keuas/900/01/2024 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Laporan Risiko dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko Tahun 2023.	Tenggarong, 5 Januari 2024 Yth. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
--	---

Dengan ini kami sampaikan Laporan Risiko dan Pelaksanaan RTP Risiko Tahun 2023 dengan dokumen terlampir.

Kepala Perangkat Daerah

 Setianto Nugroho Aji, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda (I/II/c)
 NIP. 19671027 199403 1 008

Tembusan Kepada Yth
 1. Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Selaku Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**
 3. Inspektorat selaku Unit Pengawasan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah di **Tempat**.

1 | Page

CS Dipindai dengan CamScanner





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. AP. Mangunegoro Kel. Timbau Telp.
Website : <https://bcbd.kukarkab.go.id> Email : bcbd.kukarkab.go.id Kode Pos 75511

Tenggarong, 13 September 2023

Nomor : B.2709/BPBD/UMTALPEG/800/08/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Edaran Baju Seragam ASN dan THL

Kepada.
Yth. Kepada Seluruh ASN Aparatur Sipil
Negara dan Tenaga Harian Lepas (THL)
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Di -
Tenggarong

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, ASN dan THL Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati. Maka dari itu diberitahukan kepada seluruh ASN dan THL di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menyesuaikan pakaian dinas sehari-hari tersebut diatas. Dengan penggunaan jenis pakaian sebagai berikut :

a. Untuk ASN

1. Hari Senin menggunakan seragam PDH waskat (warna khaki);
2. Hari Selasa menggunakan seragam kemeja PDH waskat/seragam BPBD Abu-abu, celana/rok hijau (menyesuaikan);
3. Hari Rabu menggunakan seragam kemeja putih, celana/rok Hitam;
4. Hari Kamis menggunakan seragam miska (menyesuaikan);
5. Hari Jum'at menggunakan Batik/olahraga (menyesuaikan);
6. Setiap tanggal 17 ASN wajib menggunakan Seragam Kopri (jam kerja).

b. Untuk THL

1. Hari Senin sampai Hari Rabu THL Wajib menggunakan seragam kemeja putih, celana/rok Hitam;
2. Hari Kamis menggunakan seragam miska (menyesuaikan);
3. Hari Jum'at menggunakan Batik/olah raga (menyesuaikan).

c. Untuk ASN & THL

1. Bagi ASN dan THL yang bertugas langsung dalam penanggulangan bencana (Piket) tetap menggunakan seragam PDL warna Orange atau Rompi (menyesuaikan).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 13 September 2023



Dokumen ini dibundel dengan tanda elektronik menggunakan Tanda Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Serifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**JADWAL PETUGAS MC, UUD 1945, PEMBACAAN VISI-MISI KUKAR IDAMAN DAN BERAHLAK
SERTA PEMBACAAN DOA PADA SETIAP HARI SENIN DILINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BULAN : JUNI 2023

NO	NAMA PETUGAS	T A N																			
		5					12					19					26				
		MC	UUD 45	VISI MISI	BERAKHLA	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	BERAKHLA	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	BERAKHLA	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	BERAKHLA	DO'A
1	SITI MULYAWATI	✓																			
2	HERNANDA SARI		✓																		
3	BUDIANDYAH			✓																	
4	YUDHA A				✓																
5	FAZRIN WINANDA					✓															
6	SRI OKTA						✓														
7	WIRADI YUSDA							✓													
8	MARATUS SYADIAH								✓												
9	SURYA ANANDA									✓											
10	HERIADI										✓										
11	SUNDARI											✓									
12	WAHDAR												✓								
13	HANI													✓							
14	SAHMI															✓					
15	JUPEDI																✓				
16	EVA																	✓			
17	NOVAN																		✓		
18	TULUS SUKMAWAN																			✓	
19	AMINI																				✓
20	ZULKIFLI																				✓



Tenggarong, 31 MEI 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BS4E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



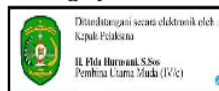
**JADWAL PETUGAS PEMBACAAN TEKS UUD 1945, MC, PEMBACAAN
VISI MISI KUKAR IDAMAN SERTA PEMBACAAN DO'A PADA APEL PAGI SETIAP HARI SENIN
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BULAN : MEI 2023

NO	NAMA PETUGAS	T A N G G A L															
		MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A
1	ANIYATI MARISA	✓															
2	KUSMARNA WARDHANU		✓														
3	AIDA NORIANA			✓													
4	SURYA ANANDA				✓												
5	HERNANDA SARI					✓											
6	LIA ROSITA						✓										
7	SITI MULYAWATI							✓									
8	H. SABRIADI								✓								
9	MARISA YUSUF									✓							
10	SAHMI										✓						
11	WAHDAR											✓					
12	JUPEDI												✓				
13	AMINI													✓			
14	NOVAN														✓		
15	EKO S W															✓	
16	ZULKIFLI																✓
17	-																
18	-																
19	-																
20	-																



Tenggarong, 5 Mei 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Badan Sertifikasi Elektronik (BS4E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



LAPORAN :

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud merupakan akronim dari:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.



Salah satu penarapan Core Value ASN Berakhlak yaitu dari kesadaran dari setiap ASN dalam memahami kemampuan bekerja dengan baik yaitu dengan belajar disiplin dan terus berusaha belajar menjadi yang lebih baik dan patuh kepada pimpinan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

JADWAL PETUGAS PEMBACAAN TEKS UUD 1945, MC, PEMBACAAN
VISI MISI KUKAR IDAMAN SERTA PEMBACAAN DO'A PADA APEL PAGI SETIAP HARI SENEN
DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BULAN : FEBRUARI 2023

NO	NAMA PETUGAS	TANGGAL															
		6				13				20				27			
		MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A	MC	UUD 45	VISI MISI	DO'A
1	HERNANDA SARI	✓															
2	LIA ROSITA		✓														
3	SITI MULYAWATI			✓													
4	H.SABRIADI				✓												
5	ANIATY MARISSA					✓											
6	ALAMSYAH						✓										
7	AIDA NORIANA							✓									
8	SURYA ANANDA								✓								
9	MARISA YUSUF									✓							
10	SAHMI										✓						
11	WAHDAH											✓					
12	JUPEDI												✓				
13	AMINI													✓			
14	NOVHAN														✓		
15	EKO S.W															✓	
16	ZULKIFLI																✓
17	-																
18	-																
19	-																
20	-																

Tenggarong, 03 februari 2023



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)